



BPN

Cegah Pungli Sertifikat Tanah

TERTANGKAPNYA Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sanggau bersama beberapa anak buahnya oleh Tim Saber Pungli dari Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar, Rabu (7/2) karena diduga melakukan Pungli dalam kepengurusan sertifikat tanah. Atas kasus tersebut membuat BPN Kapuas Hulu bergerak cepat untuk melakukan breafing kepada stafnya agar kejadian di Kabupaten Sanggau tidak terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Besok saya akan langsung kumpulkan staf saya untuk di breafing dulu, untuk menanggapi kasus Pungli BPN di Sanggau,” kata Syahrannur Kepala BPN Kapuas Hulu, Kamis (8/2).

◆ Ke Halaman 27 Kolom 1



Nasir Serahkan 1.000 Sertifikat

Sambungan dari halaman 17

Tahun 2017, tambah Syahrannur ada tiga kecamatan yang menerima PTSL di Kapuas Hulu, diantaranya kecamatan Bika, Empanang dan Badau. Untuk kecamatan Bika sebanyak 1000 bidang tanah yang dikeluarkan sertifikat, termasuk didalamnya tanah aset milik Pemda Kapuas Hulu.

PTSL Ini untuk meminimalisir sengketa di masyarakat, jadi jelas status tanahnya sudah terdaftar di BPN. Maka kita harapkan setiap desa nantinya menjadi desa lengkap, tanahnya sudah terdaftar semua, timpalnya. Syahrannur tidak menampik bahwa untuk proses legalisasi tanah masyarakat di Kapuas Hulu menemui kendala, seperti yang statusnya masuk dalam kawasan hutan, sehingga tidak bisa dilakukan penerbitan sertifikat. "Memang ini akan jadi problem dalam melegalkan bidang tanah yang menjadi hak masyarakat, ucapnya.

Dalam merealisasikan PTSL tersebut, pihaknya kata Syahrannur juga memiliki keterbatasan personil, karena hanya memiliki 2 petugas juru ukur. Maka pengukuran

dilakukan bertahap, kemudian didukung bidang Perencanaan Pemda, kecamatan serta pihak desa yang bersangkutan.

"Kegiatan kami sudah mampu menyesuaikan target yang diberikan pemerintah. Mudah-mudahan seluruh aparat desa mendukung sehingga apa yang kami lakukan bisa selesai, kemudian kegiatan kami ini mendapat dukungan penuh Pemda dan kecamatan, pungkasnya.

Di kesempatan tersebut bupati Kapuas Hulu AM Nasir, SH menyampaikan, untuk kecamatan yang mendapat PTSL ini tentu ada standar khusus yang ditetapkan oleh BPN. Menurut bupati, jumlah 3.500 bidang yang tuntas diukur dan diterbitkan sertifikat itu sangat luar biasa. Tanah yang selama ini tidak tertulis, sekarang sudah tertulis dengan adanya sertifikat.

Ini menjadi jaminan hukum dan hak masyarakat, diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meminimalisir sengketa tanah di masyarakat. Jadi sangat bermanfaat untuk kita semua, bagi yang belum nunggu giliran, karena program ini pasti berlanjut, tutur bupati.

Dijelaskan Nasir, masalah sertifikat ini bukan semata-mata kepentingan masyarakat, tapi juga pemerintah, karena berkaitan dengan aset, jika persoalan aset tidak tuntas, maka berpengaruh pada opini penilaian kinerja oleh BPK. "Kita sudah berkali-kali rapat mengundang pihak puskesmas dan lainnya supaya aset di kecamatan bisa tuntas. Sekarang memang beda, dulu tanah bisa dihibahkan untuk bangun Puskesmas dan kantor camat dengan mudah, tidak ada hitam diatas putih, tapi kadang tiba-tiba muncul tuntutan dari ahli waris, bahkan kadang ada surat saja masih ada yang menuntut, ungkap bupati AM Nasir.

Sementara itu, camat Bika Hermanus Susanto mengatakan, dengan PTSL ini tentu membuat masyarakat senang. Makanya pihaknya di kecamatan kata camat, sangat mendukung kinerja BPN dalam melaksanakan PTSL tersebut. Maka desa dan kecamatan memfasilitasi dengan sosialisasi ke masyarakat, bahkan dari perangkat desa juga ikut langsung pihak BPN mengukur bidang tanah, jadi kita sama-sama tegasnya. (aan)